

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan hidup manusia. Pendidikan bukan hanya sekedar suatu proses yang berlangsung seumur hidup, tetapi sekaligus merupakan suatu proses pembinaan diri manusia. Pendidikan politik sebagai salah satu bagian dari pendidikan secara umum, sangat membutuhkan pembinaan dalam prosesnya. Tentang hal ini GBHN 1999 menegaskan bahwa : "Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Hal ini memberikan isyarat betapa pentingnya pendidikan politik untuk ditanamkan pada setiap warga negara Indonesia agar memiliki kesadaran politik bangsa. Melalui pendidikan politik, diharapkan akan melahirkan warga negara yang demokratis, patuh pada hukum, sadar akan keberagaman dan menghargai nilai kemanusiaan secara beradab.

Sekalipun pendidikan politik itu penting, namun kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pendidikan politik baru ditanamkan pada masa setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan. Sebelumnya, pendidikan politik memang tidak ada bahkan tidak diperbolehkan adanya. Alasannya karena dikhawatirkan akan menggugah kesadaran politik yang akan mendorong rakyat memberontak terhadap pemerintah kolonial (Kartini Kartono, 1996 : 46). Pada saat pencapaian kemerdekaan bangsa, biasanya bangsa itu menekankan pada "patriotic/traditional political education", karena mendesaknya kebutuhan "nation and character

building“ sebagai landasan dan syarat objektif semua warga negara (Numan Somantri, 2001 : 229). Dengan demikian membuktikan betapa pentingnya pendidikan politik dalam membina dan membentuk kesadaran politik suatu bangsa.

Peranan pendidikan politik dalam memupuk dan membina kesadaran warga negara merupakan suatu keharusan dan sangat penting, apalagi di kalangan mahasiswa karena mereka menjadi tumpuan harapan di masa mendatang. Disajikannya pendidikan politik pada suatu negara akan mencerminkan bahwa negara tersebut memiliki pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut seperti ditegaskan International Commission of Jurists yang merupakan organisasi ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 (Miriam Budiardjo, 1983:60). Hal senada juga dikemukakan Abdul Azis Wahab (1996:7) bahwa : Betapa "pentingnya pendidikan politik bagi warga negara dalam kerangka kebijakan politik suatu bangsa".

Oleh karena itu pendidikan politik merupakan wahana pembinaan dan pembentukan kesadaran warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik menanamkan nilai-nilai dan ideologi yang dianut oleh suatu bangsa, dan pembentukan kesadaran itu akan dicerminkan oleh nilai-nilai, sikap dan ideologi yang dianut dan ditanamkannya.

Dalam membentuk kesadaran politik suatu bangsa, pendidikan politik harus ditanamkan dan dibinakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu M. Panggabean (1984:58) mengemukakan "pendidikan politik merupakan cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi kemudian".

Pemahaman terhadap konsep pendidikan politik bagi semua warga negara, terutama bagi mahasiswa banyak memainkan peran dalam perancangan

kehidupan politik adalah sangat penting. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa di dalam proses Indonesia memperoleh kemerdekaan, peranan mahasiswa yang memiliki kesadaran politik bangsa merupakan aset strategis dalam perjuangannya. Pada masa pasca kemerdekaan, perubahan itu membawa pengaruh pada kesadaran politik bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Tentu saja cita-cita yang mulia itu tidak akan pernah terwujud tanpa melalui pemahaman pendidikan politik secara konsisten yang ditanamkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Di masa Orde Lama, pendidikan politik kurang mendapat tempat secara wajar; menurut Kartini Kartono (1996:46) disebabkan karena "institusi politik yang baru dibangun kondisinya belum sehat dan belum efektif". Tidak heran bahwa kehidupan politik belum tertata dengan rapi, karena ada sistem multi-partai yang sering mencetuskan kericuhan politik dan ketidakstabilan nasional. Baru di masa Orde Baru dialami suatu kemajuan karena pendidikan politik yang ditanamkan mengalami kemapanan dan kemantapan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penetapan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) merupakan hasil kesepakatan nasional dalam upaya memberikan pemahaman dan pembentukan kesadaran berpolitik bangsa.

Pada masa Orde Baru, peranan pendidikan politik P-4 dirasakan sepertinya telah mengakar pada masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga warga negara Indonesia telah sepantasnya memiliki kesadaran politik yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara setelah ditempa melalui berbagai penataran P-4 yang diikutinya. Namun kenyataan sejarah juga membuktikan lain, kesadaran politik bangsa diterpa angin reformasi politik mahasiswa yang bergejolak dan melahirkan babak baru dalam sejarah kehidupan

politik di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa penanaman pendidikan politik tidak cukup hanya bersandarkan pada dan digiring melalui pendidikan formal yang berasal dari produk ketetapan atau peraturan pemerintah, apalagi bila suasana pendidikan yang diciptakannya tidak bersifat demokratis. Dalam kaitan tersebut menurut Kartini Kartono (1996 : 49) pendidikan politik jangan menjadi "mitos politik", sehingga pendidikan politik menjadi monopoli dan urusan negara/pemerintah. Walaupun demikian, memang peranan pendidikan politik tetap penting bagi pembentukan kesadaran bangsa akan tetapi ditentukan dan diwarnai oleh situasi politik pemerintahan yang berlangsung. Oleh karena itu, maka masalahnya adalah bagaimana menempatkan posisi penting Pendidikan Politik dalam pembentukan dan pembinaan kesadaran bangsa di kalangan generasi muda.

Sehubungan dengan itu, upaya pemahaman terhadap pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai cara baik melalui pendidikan formal seperti pada tingkat persekolahan dengan menempatkan mata pelajaran PMP atau sebutan sekarang PKn, maupun pendidikan non-formal yaitu berupa penataran-penataran serta yang disebarluaskan media massa. PKn yang diajarkan pada tingkat persekolahan merupakan pendidikan politik dalam rangka membina dan membentuk kesadaran politik anak bangsa. Sehubungan dengan itu, A.Kosasih Djahiri (1996:19) berpendapat bahwa :

"Salah satu misi pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pendidikan politik, dalam pengertian pembinaan siswa sebagai anak manusia Indonesia, maupun menjadi warga negara, masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang berkepribadian Pancasila dan UUD 1945 yang melek politik".

Ditegaskan bahwa "*warga negara yang melek politik* adalah warga negara Indonesia yang berkepribadian Pancasila, melek hukum dan konstitusi (1945), melek kehidupan berbangsa dan bernegara, melek masalah dan mau serta mampu

berkontribusi memecahkan masalah sesuai dengan fungsi dan peran harapannya". Dengan demikian bahwa sasaran pemahaman pendidikan politik adalah menjadikan warga negara yang melek politik.

Dalam pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap dalam ilmu pendidikan pada Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung 18 Oktober 1996, Abdul Azis Wahab (1996:7) menyatakan bahwa :

"Pendidikan politik bagi warga negara khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai hal yang penting dalam kerangka kebijakan politik suatu bangsa nampaknya semakin menjadi suatu keharusan, jika bangsa Indonesia ingin memperoleh penghargaan dan diperhatikan oleh bangsa-bangsa lain di dunia sebagai sebuah bangsa yang senantiasa harus diperhitungkan dalam berbagai bentuk dan aspek percaturan dunia di masa datang".

Pendidikan politik bertujuan untuk membentuk warga negara yang berperilaku baik dan demokratis. Diharapkan warga negara memiliki gagasan, pemikiran, ide serta pemahaman tentang pendidikan politik, sehingga dapat menjadi generasi harapan bangsa untuk tidak kehilangan karsa, cita-cita dan arah untuk menghadapi masa depan serta siap menghadapi tantangan dan rintangan berat yang menghadang. Apabila berhasil, pendidikan politik akan mempengaruhi dan memberi warna terhadap perilaku politik yang ditampilkan individu, yang berarti termasuk perilaku politik mahasiswa.

Rusadi Kantaprawira (1999:55) memandang "pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik", dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Menurut penegasan A. Kosasih Djahiri (1996:19) dan Abdul Azis Wahab (1996:6) agar warga negara "*melek politik*", sehingga dengan berbekalkan pengetahuan dan pemahaman pendidikan politik, mereka akan memiliki kematangan dalam bersikap dan berperilaku politik.

Pendidikan politik yang ditanamkan kepada warga negara, menurut Rusadi Kantaprawira (1999 : 57) dapat diselenggarakan antara lain melalui :

- (1) Bahan-bahan yang dapat dibaca (*readable, legible*) seperti surat kabar, majalah dan lain-lain yang bersifat publikasi massa dan yang biasa membentuk pendapat umum.
- (2) Siaran seperti radio yang dapat didengar (*audible*) dan televisi serta film yang dapat dilihat dan di dengar (*bersifat audio-visual*)
- (3) Lembaga-lembaga, asosiasi-asosiasi dalam masyarakat seperti mesjid dan gereja yang menyampaikan khotbah, serta kemungkinan juga melalui formil ataupun informil.

Jelas bahwa media massa memegang peranan penting dalam mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku individu, sehingga Kevin Philip yang dikutip Onong Uchyana (1993:162) mengatakan bahwa era sekarang lebih merupakan *mediacracy* , yakni pemerintahan media, daripada *democracy*, pemerintahan rakyat.

Dengan demikian, komunikasi sosial merupakan media pembinaan pendidikan politik. Dalam komunikasi tersebut terdapat hubungan yang bersifat dialogis baik antar individu, individu dengan kelompok ataupun antar kelompok. Dalam komunikasi politik baik secara langsung maupun tidak terdapat gagasan yang disampaikan, pendapat dan alasan yang diajukan, tanggapan dan pertanyaan yang disalurkan.

Dari gambaran tersebut di atas, fokus pembicaraan pendidikan politik yang melatari pemikiran penelitian ini merupakan salah satu kajian dari Pendidikan IPS. Pendidikan IPS bukanlah suatu bidang studi yang berdiri sendiri melainkan merupakan keterpaduan dari beberapa bidang yang mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Hal ini seperti ditegaskan Fenton (1967 : 1) bahwa "Social Studies is not a single dicipline but a group of related fields including political science, economics, sociology, anthropology, psychology, geography, and

history". Jadi ada keterpaduan dari beberapa disiplin ilmu seperti ilmu politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, geografi dan sejarah.

Hal senada sebagaimana dikemukakan Gross (1978) bahwa "The term social studies originally tended to encompass topical studies related to understanding and living in society that were not parts of the usual history, geography, or political economy offerings". Pernyataan tersebut memberikan penekanan bahwa Pendidikan IPS mencakup topik tentang hubungan saling pengertian dan kehidupan dalam masyarakat, namun bukan bagian dari sejarah, geografi ataupun politik ekonomi.

Jelas bahwa esensi pendidikan politik untuk membentuk warga negara yang baik, pada hakekatnya merupakan misi dari Pendidikan IPS. Seperti ditegaskan Gross (1978) bahwa tujuan utama Pendidikan IPS adalah (1) mempersiapkan siswa agar dapat berfungsi sebagai warga negara yang baik di dalam masyarakat yang demokratis; (2) menolong siswa membuat pengambilan keputusan yang rasional di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Jarolimek (1977 : 3-4) bahwa "Social studies education has as its particular mission the task of helping young people develop competencies that enable them to deal with, and to some extent manage, the physical and social forces (of) in which they live. Such competencies make it possible for pupil to shape their lives on harmony with those forces". Misi utama pendidikan IPS adalah menolong siswa mengembangkan berbagai kemampuannya untuk mengolah lingkungan fisik dan sosialnya agar dapat hidup harmonis di lingkungannya. Pengertian ini menekankan bahwa tujuan Pendidikan IPS yang diajarkan di sekolah adalah mengembangkan berbagai kemampuan yang berguna di masyarakat.

Sorotan lain yaitu, kedudukan dan peranan mahasiswa dalam percaturan politik sepanjang sejarah memegang peranan penting, baik pada masa Orde Lama,



Orde Baru maupun Orde Reformasi. Oleh karena itu apabila mahasiswa akan dipupuk dan diasah melalui pendidikan politik secara demokratis, diharapkan akan melahirkan gerakan atau aksi sosial yang bersifat anarkhis.

Membicarakan mahasiswa sudah begitu lekat dengan sebutan kampus dan perguruan tinggi. Artinya mahasiswa adalah individu dalam lingkungan suatu masyarakat yang keberadaannya berbeda dengan sebutan masyarakat pada umumnya. Tak akan ada universitas atau sebutan perguruan tinggi lain tanpa adanya mahasiswa, namun orang tidak akan selalu sependapat mengenai kedudukan mahasiswa dalam universitas, termasuk mengenai peranannya (Achmad Icksan, 1985 : 1).

Dilihat dari kedudukannya, predikat mahasiswa adalah sebagai kelompok elit intelektual (Knopfmacher, Altbach, 1968). Karakteristik seorang intelektual seperti dikemukakan Knopfmacher adalah :

- (1) orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang mempunyai pengetahuan setingkat dengan pengetahuan yang diberikan di pendidikan tinggi;
- (2) berminat pada masalah-masalah yang mempunyai nasib manusia, yaitu masalah-masalah moral dan masalah politik;
- (3) mampu menyatakan pendirian-pendirian moral dan pendirian politik mereka secara lisan maupun tertulis (Sarlito, 1978 : 51).

Sebagai kelompok elit intelektual, mahasiswa memiliki wawasan akademik serta sangat tertarik pada pemikiran-pemikiran politik dan masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Pemikiran yang konstruktif, kreatif walaupun kadang-kadang antagonis.

Mahasiswa berfungsi juga sebagai "kekuatan politik dan moral" (Mar'at, 1984 : 120, 131) sebagaimana dicontohkan banyak negara, seperti di Iran para mahasiswa menjadi unsur penting dalam meruntuhkan rezim Syah. Di Korea Selatan para mahasiswa membangun satu kekuatan kunci dalam oposisi. Di Turki

pada tahun 1960-an Menderes yang dengan kekuasaannya melarang kegiatan oposisi, baik dalam partai-partai, koran-koran maupun dalam organisasi-organisasi lainnya, ternyata mendapat kecaman dan menimbulkan reaksi para mahasiswa di Istanbul dan Ankara. Selain terlibat dalam persoalan politik juga melakukan aksi-aksi dengan mempersoalkan masalah pendidikan seperti menuntut dikeluarkannya dosen-dosen tertentu, mengkritik kekurangan buku di perpustakaan atau mencela makanan yang jelek di kantin (Sarlito, 1978 :181). Kejadian serupa terjadi di Indonesia, pengalaman sejarah membuktikan bahwa jatuhnya kekuasaan rezim Orde Lama dan Orde Baru oleh kekuatan massa mahasiswa. Berkaitan dengan itu Fremerey maupun Lipset yang dikutip Sarlito (1978 : 54) berpendapat mahasiswa sebagai kekuatan politik (*political pressure group*) patut diperhitungkan.

Apabila kita amati, sikap mahasiswa dalam merespon perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat dapat dikategorikan ke dalam lima tipe yaitu kelompok *Idealis Konfrontatif, Idealis Realistis, Opportunis, Profesional, dan Kreatif* (Selo Soemardjan, 1999 : 138-141).

Sikap dan perilaku mahasiswa tentu tidak hanya dilihat dari satu sisi, yang suka konfrontatif dan demonstratif, bersikap antagonis dan radikal. Sisi lain yang harus diamati tentang pemikirannya yang kreatif dan inovatif, suka memperjuangkan nasib manusia, memikirkan masalah-masalah tertentu yang menyangkut masyarakat luas. Namun demikian memang patut disesalkan bahwa berbagai pengalaman peristiwa gerakan atau demonstrasi mahasiswa adalah berkesan menimbulkan kejadian yang tidak diharapkan secara konstitusional, seperti pengrusakan kendaraan, penghancuran bangunan atau tindakan kriminal lainnya yang bukan hanya merugikan seseorang malahan meresahkan masyarakat luas. Peristiwa semacam itu mungkin

juga ditumpangi oleh pihak ketiga yang dengan sengaja atau ikut-ikutan ini mengacaukan masyarakat.



Keadaan mahasiswa dalam menghadapi sesuatu yang bersifat krusial, masalah-masalah sosial dalam masyarakat di berbagai negara hampir menunjukkan kesamaan, yaitu terdapatnya kesenjangan angkatan (*generation-gap*) dan perbedaan pendapat, yang menuntut adanya perubahan dan perbaikan, demokratisasi dan inovasi. Kenyataan membuktikan bahwa mahasiswa di Inggris sebelum tahun 1950 tercipta dalam suasana yang harmonis, perbedaan pendapat sering terkendali, hubungan mahasiswa dengan dosen bercorak "kebapakan" dipegang teguh di kalangan tradisi kampus. Namun pengaruh sosial budaya, keagamaan dan sosial politik terutama pasca Perang Dunia II besar sekali terhadap organisasi kemahasiswaan menyebabkan adanya pergeseran, menuntut hak dan kebebasan yang lebih luas (Achmad Icksan, 1985 : 14).

Keberadaan mahasiswa UPI (dulu IKIP Bandung) sebagaimana mahasiswa Perguruan Tinggi lainnya telah memainkan peranan penting dalam percaturan politik di Indonesia. Di era tahun 1960-an organisasi kemahasiswaan yang bernama dewan mahasiswa menjadi basis kehidupan politik bagi mahasiswa di lingkungan kampusnya. Para mahasiswa saat itu tidak hanya aktif dalam organisasi mahasiswa intra univesiter tetapi juga terlibat aktif memainkan peran dalam organisasi ekstra univesiter. Berbagai organisasi ekstra univesiter saat itu lebih bersifat underbouw dari partai-partai politik. Di lingkungan IKIP Bandung, para aktivis mahasiswa banyak yang tergabung dalam organisasi ekstra univesiter seperti HMI, PMII dan GMNI.

Di masa Demokrasi Terpimpin, gerakan mahasiswa mulai bermain politik secara kritis dan otonom. HMI muncul mempelopori pembentukan Kesatuan Aksi

Mahasiswa Indonesia (KAMI). Kehadiran KAMI ternyata banyak mendapatkan simpati rakyat. Hal ini terbukti tatkala KAMI bersama dengan kelompok pemuda dan pelajar mengajukan TRITURA di mana sebagian besar rakyat Indonesia memberikan dukungannya dengan berdiri di belakang KAMI. Perjuangan KAMI mencapai sukses dengan runtuhnya orde lama dan sekaligus melahirkan angkatan 1966.

Perkembangan selanjutnya, pergerakan mahasiswa dalam praktek kehidupan politik mewarnai bangsa Indonesia dengan munculnya peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974). Gerakan mahasiswa tersebut terutama ditujukan untuk mengoreksi kebijakan pemerintah Orde Baru yang dinilai dan banyak digerogeti penyakit korupsi.

Gerakan mahasiswa kembali mencuat ke permukaan saat penerapan konsep NKK dan BKK di tahun 1980-an. Melalui konsep NKK/BKK, kehidupan kampus dan terutama aktivitas mahasiswa mengalami depolitisasi. Kampus bukan merupakan arena kehidupan politik praktis, melainkan arena belajar politik yang terbatas hanya pada tataran teoritis. Kehidupan berpolitik praktis bukan di lingkungan kampus, tetapi di luar kampus.

Pergerakan mahasiswa mengalami puncaknya di era reformasi yang ditandai dengan lengsernya penguasa Orde Baru. Lahirnya gerakan mahasiswa 1998 merupakan akibat dari akumulasi ketidakpuasan dan kekecewaan politik yang telah berkecambah selama masa pemerintahan Orde Baru.

Dengan demikian, dari gambaran umum tersebut di atas mengenai persoalan pendidikan politik dan kemahasiswaan menarik untuk dikaji, salah satunya pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Dipilihnya Universitas Pendidikan Indonesia sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan :

- (1) Pada perguruan tinggi ini, sepanjang sejarahnya telah tumbuh berbagai Organisasi Kemahasiswaan baik intra maupun ekstra Universitas, yang dalam perkembangannya sangat beragam termasuk aspirasi mahasiswanya.
- (2) Selain itu perlu diingat juga bahwa mahasiswa UPI sudah lama diexpose pada pendidikan politik. Apakah pendidikan politik ini berpengaruh terhadap pemahaman politik mereka ?.
- (3) Sebagai sikap kepedulian penulis ingin mengamati lebih dekat tentang persoalan implikasi pendidikan politik dalam perilaku politik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi ini yang letaknya berdekatan sekali dengan Program Pasca Sarjana UPI Bandung.

Dilatarbelakangi pemikiran tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang implikasi pendidikan politik dalam kaitannya dengan perilaku politik aktivitas mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan.

## **B. Fokus dan Masalah Penelitian**

Dalam penelitian ini diberikan penekanan pada "pendidikan politik", hal ini didasarkan pada amanat GBHN 1999 bahwa perlunya "ditingkatkan pendidikan politik dalam kerangka pembentukan warga negara yang baik dan demokratis". Pendidikan politik pada masa pemerintahan yang berkuasa akan memberikan warna tersendiri dalam pembentukan warga negara, sebagaimana dialami dalam kenyataan sejarah di Indonesia. Persoalannya, bagaimana seharusnya pendidikan politik ditanamkan agar dapat melahirkan dan membentuk warga negara yang berperilaku demokratis, melek politik dan sadar hukum, meskipun terdapat keberagaman aspirasi dan seringnya dihadapkan pada perbedaan pendapat.

Terdapatnya perubahan sosial dan sistem politik dalam pemerintahan negara membawa pengaruh terhadap kebijakan politik yang dijalankan sekaligus mempengaruhi pada pendidikan politik yang harus ditanamkan. Perubahan itu juga membawa dampak pada perubahan-perubahan cara berpikir, cara menilai, cara menghargai hidup dan kenyataan, maupun perilaku seseorang. Akibatnya menimbulkan kekaburan nilai, gejolak politik, konflik sosial, kerusuhan massa, demonstrasi atau unjuk rasa yang tak terkendali, pengrusakan fasilitas atau sarana umum, sehingga diharapkan pendidikan politik dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Di kalangan mahasiswa, persoalan yang berkenaan dengan perilaku politik mencakup unjuk rasa, demonstrasi atau gerakan protes mahasiswa (Sarlito, 1978), perbedaan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Sehubungan dengan itu, esensi pendidikan politik memberi tempat pada mahasiswa agar dapat menyelami kehidupan pemerintahan dan kenegaraan, yang pada saatnya nanti akan diterjuni oleh mahasiswa dalam kehidupan keseharian baik dalam kemasyarakatan maupun dalam pemerintahan. Tuntutan memiliki rasa tanggung jawab untuk memajukan bangsa dan negara merupakan suatu keharusan. Karenanya, perilaku politik mahasiswa yang ditampilkan hendaknya mencerminkan sikap positif; tidak bersikap sebaliknya yaitu merusak, menjarah dan melanggar aturan yang merugikan masyarakat banyak. Ditegaskan A. Kosasih Djahiri (1996) bahwa "melek politik dan konstitusi serta terhadap permasalahan yang dihadapi" harus menjadi dasar pijakan bagi mahasiswa dalam mengamati kehidupan negara Indonesia. Kepada mahasiswa, tidak cukup hanya berbekalkan pengetahuan keilmuan masing-masing semata, tetapi hendaknya diperkaya dengan khasanah pendidikan politik yang bermakna. Perilaku politik

pimpinan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan, baik intra universitas maupun ekstra universitas pada umumnya berpengaruh dalam jabatan struktural pemerintahan. Dengan demikian, organisasi kemahasiswaan merupakan wahana pendidikan politik dalam memupuk dan membina mahasiswa berperilaku demokratis, berwawasan akademik dan politik.

Dengan demikian, maka masalah pokok yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini berkaitan dengan implikasi pendidikan politik terhadap perilaku politik pimpinan mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia, yakni mengenai pemahaman pendidikan politik dan kaitannya dengan perilaku politik dalam organisasi kemahasiswaan baik intra universitas maupun ekstra universitas. Kajian tentang "perilaku politik pimpinan mahasiswa" ini diharapkan dapat memberikan pengayaan khasanah ilmu sosial dalam mempelajari salah satu gejala sosial, yakni mengenai pendidikan politik dan perilaku politik mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan melalui pendekatan sosial khususnya pada tingkat mikro.

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- (1) Bagaimana pemahaman pimpinan mahasiswa mengenai konsep pendidikan politik ?
- (2) Bagaimana profil perilaku politik para pimpinan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan ?
- (3) Bagaimana interaksi, komunikasi dan partisipasi para pimpinan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan ?
- (4) Bagaimana pemahaman pimpinan mahasiswa mengenai konsep pendidikan politik dalam kaitannya dengan perilaku politik mereka dalam organisasi kemahasiswaan ?

## C. DEFINISI OPERASIONAL

### 1. Implikasi

Istilah "implikasi" (*implication*) mengandung arti (1) keterlibatan atau keadaan terlibat; (2) yang termasuk atau tersimpul; yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan (KBBI,2001:427). Berimplikasi artinya mempunyai implikasi; mempunyai hubungan keterlibatan. Misalnya, Kepentingan umum berimplikasi pada kepentingan pribadi sebagai anggota masyarakat. Sehubungan dengan itu, Pendidikan politik berimplikasi pada perilaku politik pimpinan mahasiswa, mengandung maksud adanya keterkaitan berupa pemahaman pendidikan politik pimpinan mahasiswa yang dihubungkan dengan interaksi, komunikasi, dan partisipasi mereka dalam bentuk perilaku politik pada organisasi kemahasiswaan.

Bertolak dari penjelasan di atas, yang dimaksud implikasi dalam penelitian ini, adalah adanya hubungan keterlibatan antara pendidikan politik dengan perilaku politik pimpinan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

### 2. Pendidikan Politik

Berkaitan dengan istilah *pendidikan politik* terdapat berbagai sebutan seperti "*political education, political socialization, and citizenship training*" (Rusadi,1977:54). Demikian pula Afan Gaffar (2000 : 118) menyebut istilah yang sama terhadap pendidikan politik dan sosialisasi politik.

Gabriel A. Almond (1974) menjelaskan istilah sosialisasi politik yaitu bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Sosialisasi politik merupakan sarana bagi

suatu generasi untuk “mewariskan” patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya (Mohtar Mas’oed & Colin Mac Andrews, 1997 : 34).

Menurut Michael Rush & Philip Althoff (1983 : 47) bahwa sosialisasi politik merupakan proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha yang saling mempengaruhi diantara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politiknya yang relevan. Sosialisasi politik ditandai dengan satu jaringan rumit dari pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang ditransmisikan individu-individu dan kelompok-kelompok individu dalam satu sistem politik, sebagai hasil dari dan memberikan kontribusi kepada satu set pengalaman-pengalaman yang terjalin di sekitar kepribadian individu untuk kemudian membentuk satu sindrom tingkah laku politik.

Pandangan lain tentang pendidikan politik seperti yang dikemukakan oleh A. Azis Wahab dan Alfian. Menurut A. Azis Wahab (1996 : 5) bahwa Pendidikan Politik secara umum adalah sosialisasi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai kehidupan yang dimaksud adalah nilai-nilai dari moral Pancasila serta nilai-nilai kehidupan yang telah diamalkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia yang memperkuat dan memperkokoh penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dan moral Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Hal senada dikemukakan Alfian (1986 : 243) bahwa Pendidikan Politik sebagai usaha sadar untuk mengolah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Pada umumnya pendidikan politik atau istilah dalam ilmu politik disebut "sosialisasi politik". Mengandung pengertian "cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi ke generasi" (M. Panggabean, 1984:58). Oleh karena itu, cara bagaimana suatu masyarakat atau bangsa mengalihkan kultur politik dari suatu generasi kepada generasi berikutnya dapat berwujud pendidikan formal dan non-formal, interaksi sosial, komunikasi sosial ataupun penteladanan. Yang dimaksud kultur politik adalah keseluruhan paduan nilai, keyakinan empirik, dan lambang-lambang ekspresif, dalam hal ini nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa (masyarakat).

Bertolak dari penjelasan di atas, penulis berketetapan bahwa *pendidikan politik* merupakan suatu proses *pewarisan dan pembinaan* nilai-nilai kehidupan, baik nilai-nilai dari moral Pancasila maupun dari nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dan budaya bangsa Indonesia, agar mereka dapat memperoleh informasi lebih lengkap dan jernih sehingga dapat bersikap kritis, demokratis dan lebih terarah hidupnya.

### **3. Perilaku Politik**

Perilaku politik merupakan suatu tindakan sosial atau perbuatan baik secara individu ataupun secara kelompok dalam merespon suatu gejala yang ada di sekitarnya. David Apter (1977 : 334) menyatakan bahwa "Perilaku Politik adalah tindakan individual dan kelompok dalam melakukan tindakan-tindakan politik". Hal senada dikemukakan oleh Robert K. Carr bahwa perilaku politik berkenaan dengan suatu tindakan manusia dalam situasi politik. Situasi politik sangat luas cakupannya antara lain: pengertian *respons emosional* berupa

*dukungan* maupun *apati* kepada pemerintah, respons terhadap perundang-undangan (Rusadi Kantaprawira, 1999 : 26).

Perilaku politik yang ditunjukkan oleh beberapa orang merupakan perilaku kolektif. James W. Van der Zenden (dalam Rafael Raga Maran, 2001 : 64) menjelaskan bahwa *perilaku kolektif* adalah cara berfikir, merasa, dan bertindak yang berkembang di kalangan sebagian besar warga masyarakat dan relatif baru tidak terdefiniskan dengan baik. Perilaku kolektif terjadi karena adanya tuntutan pada perubahan sosial. Perilaku kolektif dapat berbentuk *gerakan sosial* yaitu suatu upaya yang kurang lebih keras dan terorganisir yang dilakukan oleh orang-orang yang relatif besar jumlahnya, entah untuk menimbulkan perubahan, entah untuk menentangnya.

Menurut Ricardi Adnan bahwa perilaku politik para mahasiswa merupakan tindakan sosial, yaitu apa yang dikatakan (*what was said*) dan apa yang dilakukan (*what was done*) mahasiswa dalam rangka merespon kondisi sosial politik di tanah air (Selo Soemardjan, 1998:137). Perilaku politik mahasiswa dapat berbentuk tingkah laku massa, yang oleh Gustave Le Bon disebut sebagai "crowd" dan oleh Carl J. Couch sebagai tingkah laku kolektif (*collective behavior*) (Sarlito, 1978:34). Perilaku politik sebagai suatu bentuk perilaku sosial yang menitikberatkan hubungan antara tingkah laku aktor dengan tingkah laku lingkungannya (Zamroni, 1992:65).

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, penulis berketetapan bahwa yang dimaksud *perilaku politik* adalah suatu tindakan atau kegiatan yang berkenaan dengan kehidupan politik yang ditampilkan melalui cara berpikir, bersikap, dan bertindak baik yang berupa simpati (dukungan) maupun apati (menentang) yang ditunjukkan dalam bentuk interaksi, komunikasi dan partisipasi para pimpinan

mahasiswa baik individu, organisasi maupun gerakan protes mahasiswa. Perilaku politik juga dimaksudkan adalah suatu kegiatan atau tindakan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang dilakukan oleh pimpinan mahasiswa dalam menyoroti persoalan kehidupan politik.

#### 4. Pimpinan Mahasiswa

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan secara struktural maupun fungsional (Mar'at, 1984 : 7). Sebutan pemimpin bisa berbentuk sebagai ketua, kepala, atau presiden seperti ketua Senat Mahasiswa, Presiden Mahasiswa. Sedangkan sebutan "pimpinan" tidak hanya ditujukan pada jabatan seseorang sebagai ketua atau kepala saja, tetapi bersifat organisatoris, yaitu sejumlah orang yang memangku jabatan dalam kepengurusan suatu organisasi baik sebagai ketua, sekretaris atau jabatan lainnya.

Dalam pandangan Weber (dalam Johnson, 1988 : 224, 227) bahwa kepemimpinan itu memiliki otoritas/kekuasaan yaitu kemampuan untuk memaksakan kehendak seseorang meskipun mendapat tantangan dari orang lain. Weber mengidentifikasi tiga dasar legitimasi yang utama dalam hubungan otoritas; ketiganya dibuat berdasarkan tipologi tindakan sosial. Masing-masing tipe berhubungan dengan tipe struktur administratif sendiri dan dinamika sosialnya sendiri yang khusus. Tipe-tipe yang dimaksud adalah "*otoritas tradisional, otoritas kharismatik, otoritas legal-rasional*". Kepemimpinan mahasiswa, dilihat dari sisi pandangan Weber, dapat dikategorikan pada "*otoritas legal - rasional*", karena mahasiswa memiliki komitmen secara moral

dan rasional terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal.

Pemimpin mahasiswa adalah mahasiswa aktivis (Kartini Kartono, 1998 : 291) yang memainkan peranan penting dalam suatu pembaharuan negara atau masyarakat, di tengah gerakan pembangunan, bahkan juga pada masa pemberontakan dan revolusi. Sarlito (1978 : 18) menyebut kepemimpinan mahasiswa sebagai "kelompok aktivis". Kepemimpinan mahasiswa juga dapat dipandang sebagai kelompok "elit mahasiswa", yaitu orang yang sangat berbakat atau terbaik dalam masyarakat (Haedar Nashir, 2000 : 21). Artinya elit mahasiswa sebagai orang yang terpilih, yang memiliki kemampuan (pengaruh) dalam menggerakkan massa (Mar'at, 1984 : 131).

Istilah *elit* adalah orang-orang yang sangat berbakat atau terbaik dalam masyarakat. Dalam sosiologi istilah *elit* pada umumnya selalu dikaitkan dengan elit politik (*political elites*). Pandangan tersebut didasarkan atas asumsi dari teori tentang elit, yang membagi atau membedakan anggota masyarakat antara elit dan massa sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan masyarakat modern yang kompleks (Haedar Nashir, 2000 : 21). Menurut Etzioni sebagaimana dikutip Keller, elit adalah kelompok aktor yang mempunyai kekuasaan. Sehingga elit dikatakan sebagai orang atau sekelompok orang yang memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat. Kehadiran elit dalam kehidupan masyarakat menurut Mosca sebagaimana dipaparkan Bellamy, melekat dengan watak sosial manusia, bahwa keunggulan watak moral biasanya menang dalam jangka panjang atas keunggulan jumlah dan kekuatan.

Sebutan *mahasiswa* adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya dalam ikatannya dengan perguruan tinggi. Dalam



penelitian ini mereka yang terdaftar (tercatat) sebagai mahasiswa pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Sarlito (1998:18) membedakan mahasiswa dalam tiga kategori ada aktivis pengikut, aktivis pemimpin, dan non aktivis. Dalam penelitian ini menggunakan sebutan pimpinan mahasiswa, dimaksudkan sekelompok orang yang menduduki jabatan tertentu dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan, baik dalam organisasi intra universitas maupun ekstra universitas.

#### **D. Asumsi Penelitian**

1. Pendidikan politik merupakan suatu proses transmisi dan transformasi nilai atau kultur politik pada suatu generasi; bukan pendidikan indoktrinatif. Karena itu, melalui pendidikan politik, baik dari segi proses, substansi maupun hasil harus memberikan nilai yang bermakna "educated, intensional, demokratisasi dan lebih manusiawi".
2. Dihadapkan pada perubahan sosial dan sistem politik dengan tuntutan perkembangan yang semakin maju, maka makin memperkuat esensi pendidikan politik yang bukan hanya menjadi kepentingan penguasa atau negara, tetapi juga bagi kepentingan warga negara. Oleh karena itu, dalam pendidikan politik harus ditempuh suatu kebijakan yang mengubah pandangan yang menempatkan warga negara hanya sekedar sebagai objek dari keinginan dan kekuasaan negara, yaitu pergeseran dari *State Oriented* ke arah *Citizen Oriented* dimana warga negara harus dapat merasakan dan memanfaatkan pergeseran itu terutama dalam menumbuhkan kemampuan dan kompetensinya sebagai warga negara. (Abdul Azis Wahab, 1996: 9).

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pemahaman pimpinan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung tentang konsep pendidikan politik, dan penerapannya terhadap perilaku politiknya dalam organisasi kemahasiswaan, baik intra universiter maupun ekstra universiter.

Secara spesifik, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- (1) Mengetahui gambaran tentang pemahaman pimpinan mahasiswa tentang konsep pendidikan politik. Tujuan ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman pimpinan mahasiswa tentang konsep pendidikan politik yang telah diperolehnya baik melalui kegiatan akademik (perkuliahan), penataran, maupun kegiatan pembinaan atau pengkaderan lain dalam berbagai organisasi yang telah diikutinya.
- (2) Mengetahui gambaran tentang profil perilaku politik pimpinan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan baik intra universiter maupun ekstra universiter. Berbagai organisasi kemahasiswaan intra universiter seperti Himpunan Mahasiswa (Hima), Senat Mahasiswa (SMPT), Dewan Perwakilan Mahasiswa, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Presiden Mahasiswa, UKM, atau lainnya. Berbagai organisasi ekstra universiter baik yang bersifat keagamaan, nasional atau kedaerahan seperti : HMI, IMM, PMKRI, GMNI, IMB, KAMMI, HAMMAS, dan lain-lain. Tujuan ini untuk mengetahui partisipasi aktif mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan ataupun dalam gerakan protes mahasiswa.
- (3) Mengetahui gambaran tentang interaksi, komunikasi dan partisipasi antar mahasiswa, serta antara mahasiswa dengan pimpinan mahasiswa dalam

organisasi kemahasiswaan. Interaksi, komunikasi dan partisipasi dimaksudkan bisa dilakukan secara langsung dalam bentuk dialog atau ditampilkan dalam bentuk tulisan (media cetak) dan gerakan protes mahasiswa.

- (4) Mengetahui gambaran tentang keterkaitan pemahaman konsep pendidikan politik dengan perilaku politik pimpinan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran yang bermanfaat, baik untuk keperluan pengembangan keilmuan maupun untuk kepentingan praktis dalam kehidupan kemasyarakatan. Kajian ini terfokus pada pokok masalah tentang pendidikan politik dan perilaku politik pimpinan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan, oleh karenanya diharapkan memberikan manfaat, yaitu :

### **(1) Manfaat Teoritis**

Meskipun ada beberapa penelitian terdahulu menyoroti tentang pendidikan politik, namun relevansinya berbeda. Karena kajian "pendidikan politik" dalam penelitian ini berhubungan dengan "perilaku politik pimpinan mahasiswa", berarti secara konseptual diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk pengembangan keilmuan. Selain itu juga diharapkan dapat mendukung terhadap terciptanya dan suksesnya pembangunan sebagaimana yang dicita-citakan dalam ketetapan MPR, khususnya yang menyangkut "peningkatan pendidikan politik bagi warga negara".

### **(2) Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi :



- a. Institusi, sebagai masukan bagi perguruan tinggi yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan pembinaan mahasiswa melalui pendidikan politik, sehingga diharapkan melahirkan mahasiswa yang mencerminkan sikap dan perilaku politik bukan saja berwawasan akademik, tetapi juga memiliki pengetahuan di bidang politik, hukum dan konstitusi.
- b. Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas interaksi, komunikasi dan partisipasi dalam suasana dan nuansa akademik, demokratis, harmonis serta penuh tanggung jawab, khususnya dalam organisasi kemahasiswaan.
- c. Peneliti sendiri, melalui penelaahan secara konseptual dari berbagai literatur dan pengalaman di lapangan, serta arahan dari pembimbing dan masukan dari nara sumber lain, menempa penulis menjadi lebih kritis dan responsif. Dan pada akhirnya akan menambah dan memperluas wawasan dan cakrawala berpikir serta kemampuan dalam memecahkan masalah dan tantangan yang dihadapi.